

Policy Brief

KOMUNIKASI RISIKO VAKSINASI COVID-19 BAGI LANSIA DI KABUPATEN KARANGASEM, BALI



AUSTRALIA INDONESIA
HEALTH SECURITY
PARTNERSHIP



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

www.aihsp.or.id



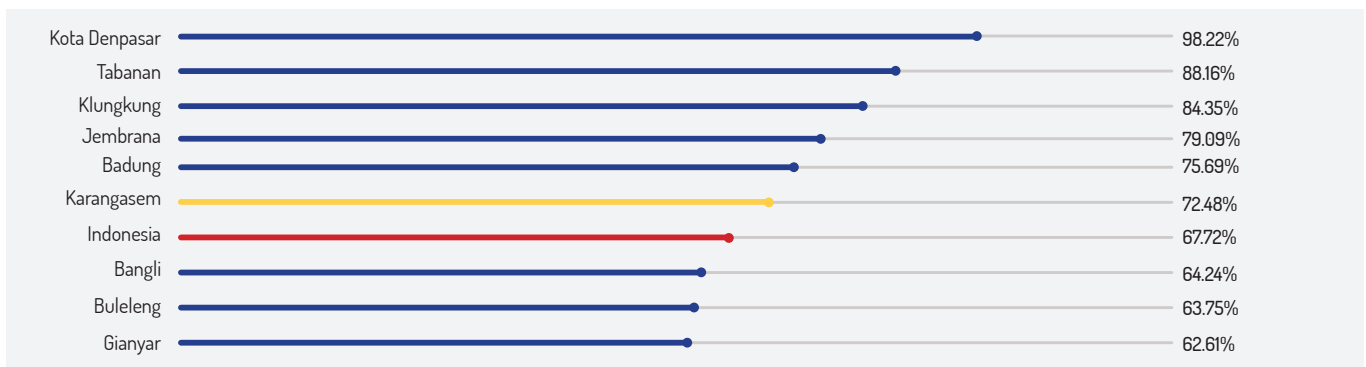
Ringkasan Eksekutif

Cakupan vaksinasi COVID-19 penduduk ber KTP Kabupaten Karangasem mencapai 106,5 persen dan tertinggi di Bali. Namun cakupan vaksinasi kelompok lanjut usia (lansia) di Karangasem tidak setinggi capaian kelompok target yang lain meskipun telah melampaui capaian nasional. Keterbatasan aksesibilitas terhadap pelayanan vaksin dan informasi tentang vaksinasi di kalangan lansia, terutama lansia dengan status sosial ekonomi rendah menjadi tantangan tersendiri.

Pendahuluan

Cakupan vaksinasi COVID-19 lengkap sesuai KTP di Bali mencapai 98,48 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 73,47 persen. Penduduk dengan KTP Karangasem memiliki cakupan vaksinasi tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya di Bali dengan capaian 106,5 persen¹. Berdasarkan segmentasi penerima vaksin, cakupan vaksinasi lengkap untuk kelompok lanjut usia (lansia) di Karangasem mencapai 72,48 persen, lebih tinggi dari cakupan Indonesia sebesar 67,72 persen².

Cakupan Vaksinasi Lengkap Kelompok Lansia di Bali Berdasarkan Lokasi Vaksinasi



Sumber: Kementerian Kesehatan, 7 Juli 2022

Lansia merupakan kelompok rentan yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19³. Tercatat sebanyak 47.085 lansia di Karangasem yang menjadi target vaksinasi COVID-19⁴.

Berdasarkan lokasi vaksinasi, cakupan vaksinasi lansia di Karangasem berada di atas rata-rata nasional, namun menempati urutan ke enam di antara kabupaten/kota lain di Bali. Keterbatasan aksesibilitas terhadap vaksin dan informasi tentang vaksin pada kelompok lansia mengakibatkan cakupan vaksinasi pada kelompok ini belum merata. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana pandangan, penerimaan, kekhawatiran, dan aksesibilitas

¹ Katadata.co.id. 26 Juni 2022. Daftar Kabupaten/Kota dengan Cakupan Vaksinasi Lengkap sesuai KTP Tertinggi di Bali (Minggu, 26 Juni 2022). Diakses 29 Juni 2022 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/28/daftar-kabupatenkota-dengan-cakupan-vaksinasi-lengkap-sesuai-ktp-tertinggi-di-bali-minggu-26-juni-2022>.

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2022. Vaksinasi COVID-19 Berdasarkan Provinsi dan Kabupaten / Kota (Data per Tanggal 3 Juli 2022, Pukul 18.00).

³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/598/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Serta Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2022. Vaksinasi COVID-19 Berdasarkan Provinsi dan Kabupaten / Kota (Data per Tanggal 7 Juli 2022, Pukul 18.00).



lansia di Kabupaten Karangasem terhadap vaksin, 3T⁵, dan pencegahan COVID-19. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengundang 6 lansia laki-laki dan 6 lansia perempuan penduduk Desa Rendang dalam diskusi kelompok terpumpun yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Desa Rendang. Diskusi antara laki-laki dan perempuan dipisah untuk menjamin keterbukaan informasi.

Hasil dan Kesimpulan

Tantangan yang ditemukan dalam pelaksanaan vaksinasi dan pencegahan terhadap COVID-19 pada kelompok lansia di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali antara lain adalah sebagai berikut:

1. Keputusan vaksinasi tidak berada di tangan lansia

Mayoritas kelompok lansia tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan vaksinasi meskipun mereka menaruh kepercayaan kepada program Pemerintah dan akan menerima jenis vaksin apapun yang tersedia. Contoh baik yang diberikan oleh pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dengan melakukan penerapan vaksinasi terlebih dahulu pada dirinya sendiri telah mendorong kepercayaan masyarakat terhadap vaksin, termasuk kelompok lansia. Vaksin dipercaya aman dan dapat meningkatkan imunitas tubuh terhadap COVID-19. Namun bagi kelompok lansia, keputusan untuk melakukan vaksinasi berada di tangan keluarga, terutama anak dan cucu yang memegang peran penting dalam pengambilan keputusan apakah lansia boleh divaksin atau tidak.

2. Keterbatasan akses lansia ke lokasi vaksinasi

Kegiatan vaksinasi dilaksanakan di tempat-tempat strategis, seperti balai banjar, balai desa, ruang pertemuan dan tempat-tempat lain yang mudah di akses oleh masyarakat, termasuk lansia. Sebagai kelompok yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan vaksinasi, layanan vaksinasi door to door diberikan oleh petugas Kesehatan terhadap lansia yang memiliki kondisi tertentu. Layanan transportasi jemput-antar lansia ke lokasi vaksinasi pun dilakukan oleh keluarga, tetangga, petugas Banjar dan aparat desa kepada lansia yang memiliki kesulitan akses ke lokasi vaksinasi. Namun faktanya, masih banyak lansia yang tidak mendapatkan vaksinasi.

3. Kemampuan literasi yang rendah

Tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi berbanding lurus dengan pandangan, penerimaan dan kekhawatiran terhadap vaksin dan upaya pencegahan COVID-19. Lansia pensiunan akan menggali lebih dalam informasi yang didapatkan dengan pencarian di Internet atau bertanya kepada petugas yang berwenang. Lansia berprofesi sebagai buruh tani cenderung menerima begitu saja informasi yang didapatkan tanpa memperdulikan apakah informasi itu benar atau hoaks. Informasi tentang COVID-19 yang disampaikan melalui selebaran, spanduk dan baliho seringkali diabaikan. Penggunaan media sosial pun tidak akan sampai ke kelompok lansia ini karena sebagian besar dari mereka tidak menggunakan media sosial dan tidak memiliki telepon genggam. Informasi tentang COVID-19, termasuk berita hoaks mereka dapatkan dari siaran TV, radio, keluarga dekat, dan tetangga.

⁵ Test, trace & treat.



4. Sertifikat vaksin menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial

Adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bahwa sertifikat vaksin menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial membuat masyarakat penerima bantuan sosial, termasuk lansia menjadi lebih antusias untuk mendapatkan vaksinasi. Keluarga lansia yang awalnya menolak vaksinasi terhadap orang tua mereka pun akhirnya memberikan izin. Selain bantuan sosial, sertifikat vaksin juga menjadi syarat dalam pengurusan administrasi di Banjar dan Kantor Desa serta syarat perjalanan keluar daerah dan memasuki gedung tertentu. Namun menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat mendapatkan bantuan sosial dan layanan administrasi bukan merupakan solusi jangka panjang, terutama untuk pelaksanaan vaksinasi booster.

5. Keengganan menggunakan masker dan tidak bisa menjaga jarak

Menggunakan masker dan menjaga jarak adalah dua dari 5M yang sering dilanggar oleh lansia. Meskipun Kantor Desa Rendang, sebagai contoh, memanfaatkan potensi desa dalam pembuatan 1.000 masker kain untuk dibagikan secara gratis kepada warganya dan jumlah ini pun terus bertambah seiring dengan peningkatan kebutuhan warga akan masker, tetap saja lansia enggan menggunakan masker. Rasa sesak ketika memakai masker menjadi alasan utama bagi lansia untuk tidak menggunakan masker dengan benar. Banyak lansia yang hanya menggantungkan masker di dagu untuk memenuhi persyaratan menggunakan masker ketika keluar rumah atau ketika mengikuti kegiatan adat, termasuk upacara keagamaan yang mewajibkan penggunaan masker. Bagi lansia perempuan, menjaga jarak sulit dilakukan ketika sedang berbelanja di pasar atau warung yang membuat mereka berdesakan dengan orang lain. Menjaga jarak pada kegiatan upacara keagamaan atau adat tertentu juga sulit dilakukan meskipun mayoritas yang hadir menggunakan masker dan kegiatan dibawah pengawasan Satgas Covid Desa atau Satgas Banjar.

6. Ketakutan terkonfirmasi positif COVID-19

Banyak masyarakat, termasuk kelompok lansia yang merasa takut untuk melaksanakan tes COVID-19 karena takut di 'Covid' kan. Mayoritas lansia mengatakan bahwa mereka tinggal di zona aman dan tidak pergi kemana-mana selama pandemi COVID-19 sehingga merasa tidak perlu melakukan nose swab karena tidak mungkin tertular COVID-19. Ketika bergejala, sebagian besar lansia lebih memilih untuk mengkonsumsi herbal jenis tertentu yang dipercaya mampu menangkal dan menyembuhkan COVID-19.

7. Keterbatasan penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi

Aplikasi Peduli Lindungi hanya digunakan oleh lansia pensiunan untuk keperluan masuk ke Gedung Bank ketika mengambil uang pensiun. Mayoritas lansia, terutama buruh tani tidak memiliki telepon genggam. Walaupun ada, telepon genggam hanya digunakan untuk keperluan telepon atau menerima pesan singkat karena bukan termasuk jenis telepon pintar yang dapat di install aplikasi peduli lindungi. Selain itu, keterbatasan jaringan internet menyebabkan aplikasi Peduli Lindungi tidak populer di kelompok lansia. Untuk alasan lebih praktis, sebagian lansia mencetak sertifikat vaksin menyerupai SIM atau KTP untuk ditunjukkan ke petugas ketika ada pemeriksaan ataupun untuk masuk ke dalam Gedung yang mensyaratkan sertifikat vaksin COVID-19.



Pilihan Kebijakan

Beberapa pilihan kebijakan yang dapat dilakukan untuk memastikan kelompok lansia di Kabupaten Karangasem mendapatkan informasi secara utuh dan benar tentang COVID-19 dan meningkatkan aksesibilitas mereka terhadap vaksinasi COVID-19, yaitu:

1. Pelaksanaan vaksinasi inklusif bagi lansia

Sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai penyakit, pelaksanaan vaksinasi bagi lansia dapat dilakukan secara khusus dan terpisah dari kelompok masyarakat lainnya. Kegiatan vaksinasi door to door menjadi pilihan yang tepat untuk mengejar ketinggalan cakupan vaksinasi lansia terutama untuk vaksinasi kedua dan booster.

2. Intensifikasi penyampaian informasi untuk lansia dan keluarganya

Pengembangan KIE terkait vaksinasi dan pencegahan COVID-19 pada lansia tidak saja ditujukan kepada lansia melainkan juga kepada keluarga atau pendamping lansia. Ketika kelompok lansia lebih menyukai interaksi langsung melalui komunikasi tatap muka, maka keluarga atau pendamping lansia yang usianya lebih muda cenderung mencari informasi melalui media sosial atau kanal informasi lainnya di Internet.

Rekomendasi

1. Mendorong Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem untuk mengembangkan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dengan menggunakan bahasa lokal yang lebih sederhana yang mampu menjawab kekhawatiran dan kebutuhan informasi COVID-19 dan vaksin COVID-19 yang diperlukan oleh lansia dan keluarga atau pendamping lansia.
2. Meningkatkan peran kader kesehatan sebagai edukator lapangan untuk menyampaikan KIE bagi lansia maupun kepada orang-orang yang dipercaya lansia melalui komunikasi tatap muka dan menggunakan pendekatan sensitif budaya.
3. Meningkatkan kerja sama lintas sektor dan peran tenaga kesehatan di Puskesmas dalam penjangkauan vaksinasi untuk lansia, terutama lansia rentan yang sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan vaksinasi kedua dan booster.

Policy Brief ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang didanai oleh Kemitraan Australia-Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP). Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah milik penulis sendiri dan belum tentu mencerminkan pandangan AIHSP. Pemerintah Australia tidak mengabsahkan pandangan dalam publikasi ini maupun menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang terkandung dalam publikasi ini.

Informasi Lebih Lanjut

Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP)

International Financial Centre (IFC), Tower 2, Level 18, Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920

Website: www.aihsp.or.id

E-mail: info@aihsp.or.id